



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
UNIT KERJA : INSPEKTORAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KAMAL RIMOSAN
2. Jabatan : INSPEKTUR II
3. NHK : 790929

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.100.000.000

1. Bangunan Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 715 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Bangunan Seluas 6.88 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT
, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Bangunan Seluas 6.88 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT
, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Bangunan Seluas 61.2 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 379.500.000

1. MOBIL, TOYOTA HARIER MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 145.000.000
2. MOTOR, VESPA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
34.500.000
3. MOBIL, MITSUBISHI MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.132.364.940**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----



Sub Total	Rp.	5.611.864.940
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.611.864.940

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.